

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu serta beberapa teori atau konsep yang relevan dengan judul penelitian Pemberdayaan Sosial Ekonomi Penerima Manfaat Program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang Pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Bandung, yakni sebagai berikut.

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. Ariel Pandita Dhairyya dan Erna Herawati. Universitas Padjadjaran. *Indonesian Journal of Anthropology*. 2019.

Penelitian ini membahas kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial pada Kelompok Berani Binangkit (KBB) di Kota Bandung yang sebagian besar anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik. Kegiatan utama di kelompok ini adalah produksi kaki tangan palsu. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan model studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat pada seluruh kegiatan KBB, dan wawancara mendalam pada anggotanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi rumah tangga para anggota. Namun, pemberdayaan sosial justru memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial para anggota. Kepercayaan diri para anggota yang

terbentuk dari ikatan emosional dan komunikasi antar anggota mendorong penyandang disabilitas memiliki pemikiran terbuka dalam menyikapi kondisi fisiknya dan merespon stigma negatif mengenai penyandang disabilitas.

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Venty Umi Fazira. Poltekesos Bandung. Skripsi Sarjana Terapan. 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang karakteristik informan, pemberian pengetahuan, pelatihan keterampilan, penyediaan sumber daya, pemberian kesempatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan, Fasilitator Desa dan KPM PKH di desa Kapar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan keterampilan melalui Program Keluarga Harapan ini belum pernah dilaksanakan di Desa Kapar. Namun, di Desa Kapar pernah mengadakan pelatihan keterampilan oleh Kader Desa, pelatihan pembukuan oleh Dinas Sosial. Penelitian yang dilakukan juga menunjukkan keinginan KPM PKH untuk mengikuti program keterampilan khususnya di bidang Tata Boga. Sebagai upaya untuk menjawab masalah tersebut, maka dibentuk kegiatan Pemberdayaan KPM PKH Melalui Program Pelatihan Keterampilan di bidang Tata Boga.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) di Kampung Teras Pancasila Kelurahan Karang Tengah

Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Eka Nursaadah. Poltekesos Bandung. Skripsi Sarjana Terapan. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan melalui program Kampung Sejahtera Mandiri di Kampung Teras Pancasila Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sisi lain, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian tentang proses pemberdayaan melalui program Kampung Sejahtera Mandiri di Kampung Teras Pancasila memperlihatkan adanya serangkaian tahap yang dilakukan, meliputi tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi kemampuan, dan pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan. Kemandirian masyarakat dalam bidang lain belum begitu maksimal, khususnya terhadap masalah pengelolaan sampah. Program yang diusulkan yaitu “Optimalisasi Program Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) melalui Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Teras Pancasila”.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti menyusun rangkuman persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti lebih jelas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Relevansi
1.	Ariel Pandita Dhairyya dan Erna Herawati. (2019). <i>Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung.</i>	Hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi rumah tangga para anggota. Namun, pemberdayaan sosial justru memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial para anggota. Ikatan emosional, komunikasi yang unik antar anggota, berdampak pada terbentuknya kepercayaan diri para anggota. Hal itu mendorong disabilitas memiliki pemikiran yang terbuka dalam menyikapi kondisi fisiknya dan merespon stigma negatif mengenai penyandang disabilitas fisik di masyarakat. Para anggota mampu membangun identitas sosial yang lebih kuat di masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian yaitu pemberdayaan sosial ekonomi. 2. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian. 2. Jenis program pemberdayaan. 3. Jenis penerima manfaat program pemberdayaan. 4. Tidak terdapat rekomendasi program. 	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pemberdayaan sosial ekonomi melalui suatu program, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang meneliti tentang pemberdayaan sosial ekonomi.
2.	Venty Umi Fazira (2022) <i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong</i>	Hasil penelitian menunjukkan keinginan KPM PKH untuk mengikuti program keterampilan khususnya di bidang Tata Boga seperti memasak dan membuat aneka macam kue. Sebagai upaya untuk menjawab masalah tersebut, dibuatlah kegiatan Pemberdayaan KPM PKH Melalui Program Pelatihan Keterampilan di bidang Tata Boga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan perspektif pekerjaan sosial. 3. Terdapat rekomendasi pengembangan program. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian. 2. Jenis program pemberdayaan. 3. Jenis penerima manfaat program pemberdayaan. 5. Variabel yang diteliti. 	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti.

3.	Eka Nursaadah. (2022). <i>Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) di Kampung Teras Pancasila Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah</i>	Proses pemberdayaan masyarakat pada tahap transformasi kemampuan dan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan umumnya berfokus terhadap kemandirian bidang ekonomi melalui potensi usaha mikro kecil dan menengah. Kemandirian masyarakat dalam bidang lain belum begitu maksimal, khususnya terhadap masalah pengelolaan sampah. Program yang diusulkan yaitu “Optimalisasi Program Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) melalui Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Teras Pancasila”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan perspektif pekerjaan sosial. 2. Terdapat rekomendasi pengembangan program. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian. 2. Jenis program pemberdayaan. 3. Jenis penerima manfaat program pemberdayaan. 4. Variabel yang diteliti. 	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial, sehingga dapat menjadi referensi bagi pneliti.
----	---	---	--	--	---

Penelitian yang diteliti oleh Peneliti berjudul Pemberdayaan Sosial Ekonomi Penerima Manfaat Program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang Pada BBPPKS di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni untuk mendeskripsikan, menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan perspektif Pekerjaan Sosial dimana dalam BAB 5 terdapat alternatif rencana program. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI dan Tim kerja Sentra Kreasi ATENSI dari BBPPKS di Bandung.

2.2. Teori yang Relevan Dengan Penelitian

2.2.1. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai dikenal pada tahun 1970-an, dan terus mengalami perkembangan sepanjang 1980-an hingga 1990-an. Kemunculan konsep pemberdayaan hampir berdekatan dengan aliran eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme yang kemudian diikuti oleh hadirnya pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk aliran strukturalisme dan kritik sekolah Frankurt. Selain itu, terdapat pula konsep elite, kekuasaan, *anti-establishment* (antikemapanan), gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Kemunculan konsep pemberdayaan ini sebagai abah dan respon terhadap piiran, tata masyarakat, dan tata budaya yang berembang di suatu negara (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 dalam Hikmat, 2006).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' yang berarti 'kekuasaan' atau 'keberdayaan'. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Pada sisi lain, dari segi terminologi,

terdapat banyak ahli yang menawarkan definisi dan konsep dari pemberdayaan (*empowerment*).

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa:

“Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system’, and so on” (Ife, 1995).

Definisi tersebut mendeskripsikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong untuk kreatif agar dapat menyelesaikan peran atau tugasnya dengan baik.

Di samping itu, menurut Ife (1995) dalam Rustanto et al. (2010), pemberdayaan merupakan tujuan dari pengembangan masyarakat. Dengan begitu, pemberdayaan dilakukan dengan berbagai hal yang bertujuan untuk meningkatkan daya atau kekuatan dari kelompok yang diberdayakan. Lebih spesifik, menurut Ife dan Tesoriero (2018:510), pemberdayaan dilakukan dengan menyediakan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas agar dapat menentukan masa depan serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan melalui pemberian pengetahuan ini berfokus pada pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan, termasuk peningkatan kesadaran dalam memahami struktur sosial, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Selain itu, pelatihan merupakan peran edukatif yang paling spesifik karena melibatkan dan mengajarkan

penduduk untuk melakukan sesuatu. Dalam memperoleh berbagai sumber daya, bahwa pemberian dana dari pemerintah dinilai lebih efektif menjadi sebuah kekuatan dari kesejahteraan daripada sebuah inisiatif masyarakat.

Secara umum, tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemberdayaan berfokus untuk meningkatkan keberdayaan dari orang-orang lemah yang dirugikan (Ife & Tesoriero, 2008).

Lebih jelas, Mardikanto (2014) dalam Larashati, (2020) menyebutkan enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) memperbaiki kelembagaan (*better institution*) yang memuat aturan dan norma untuk melakukan perbaikan kegiatan pembangunan; (2) memperbaiki usaha (*better business*) dengan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas SDM; (3) memperbaiki pendapatan (*better income*) dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga menambah pendapatan melalui upah; (4) memperbaiki lingkungan (*better environment*) dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan; (5) memperbaiki kehidupan (*better living*) setiap keluarga dan masyarakat; serta (6) memperbaiki masyarakat (*better community*) dengan melibatkan masyarakat pada proses pemberdayaan.

Parsons et.al. (1994) dalam Suharto (2017) menyatakan bahwa proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif, dan tidak terdapat literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi antara pekerja sosial dan klien dalam *setting* pertolongan individu. Pelaksanaan proses dan

pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang terdiri dari (a) pemungkinan, dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan potensi masyarakat secara optimal; (b) penguatan, dalam hal pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya; (c) perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak ditindas dan diskriminasi; (d) penyokongan, dengan memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat mampu berperan sesuai tugasnya; (e) pemeliharaan, dengan menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang mencakup berbagai bidang dan berbagai ranah pembangunan kemasyarakatan. Namun, secara umum dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup dari program pemberdayaan masyarakat dapat dibuat ruang berdasarkan berbagai bidang yang sering dijadikan objek dan sasaran dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang mengelompokkan ruang lingkup pemberdayaan ke dalam beberapa bidang.

Menurut Ndraha (2003) dalam Fitriyana (2018) menyatakan bahwa ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bidang, yakni: (a) bidang politik, yang berorientasi pada upaya penguatan kedudukan daya tawar (*bargaining position*) masyarakat dengan tujuan agar posisi dan kedudukan masyarakat tidak dijadikan sebagai pihak sub ordinat oleh para pemangku kepentingan; (b) bidang ekonomi, berhubungan dengan usaha meningkatkan keswadayaan dan atau kemandirian dalam kehidupan perekonomian masyarakat

berdasarkan potensi yang dimiliki yang sifatnya mendorong produktivitas masyarakat; (c) bidang sosial budaya, yang berkaitan dengan usaha peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan solidaritas masyarakat, penguatan kerentanan terhadap konflik, dan penguatan solidaritas sosial, termasuk juga tentang kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural; serta (d) bidang lingkungan, yang fokus pada upaya melindungi dan mengelola lingkungan agar tetap terjaga kelestarian dan keberlangsungan dengan baik ekosistem yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pemberdayaan merupakan konsep yang luas untuk mendeskripsikan suatu upaya pemberian daya kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian terkait konsep pemberdayaan yang lebih spesifik. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pemberdayaan di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Berikut adalah penjelasan konsep pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara lebih spesifik.

1. Konsep Pemberdayaan Sosial

Merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2019, pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melakukan beberapa program pemberdayaan sosial, untuk mengukur keberhasilan program dalam melaksanakan pemberdayaan sosial dapat menggunakan *generic indicator* pemberdayaan sosial yang terdiri atas (a) *ability*, berkaitan dengan peningkatan

kemampuan dan kekuatan yang mampu ditunjukkan oleh sasaran pemberdayaan; (b) *asset*, berkaitan dengan peningkatan kemampuan sasaran pemberdayaan dalam hal pemanfaatan aset, material, sisi ekonomi, dan cultural; dan (c) *accessibility*, berkaitan dengan adanya peningkatan akses jaringan sosial yang ada, adanya partisipasi dan integrasi yang baik antara sasaran pemberdayaan dengan pemberdaya (Nursaadah, 2022).

Herrmann (2012:202) berpendapat bahwa dalam menentukan atau mencari definisi pemberdayaan harus mempertimbangkan terkait dengan hal berikut :

Social Empowerment is concerned with the means and processes and relations necessary for people to be capable of actively participating in social relations and actively influencing the immediate and more distant social and physical environment (Herrmann, 2012:202).

(Pemberdayaan Sosial berkaitan dengan sarana, proses, dan hubungan yang diperlukan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dalam hubungan sosial dan secara aktif mempengaruhi lingkungan sosial dan fisik yang dekat maupun yang lebih jauh).

Lebih singkatnya,

Social Empowerment is the degree to which the personal capabilities and the ability of people to act are enhanced by social relations (Herrmann, 2012:202).

(Pemberdayaan Sosial adalah sejauh mana kemampuan pribadi dan kemampuan orang untuk bertindak ditingkatkan oleh hubungan sosial).

Pemberdayaan selanjutnya menjadi inti dari keseluruhan proyek kualitas sosial (Herrmann, 2012). Dengan begitu, pendekatan kualitas sosial dipahami sebagai teori dialektika tindakan, yang mana pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan tetapi berkaitan juga dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi tertentu. Herrmann (2012) juga menyarankan untuk mendefinisikan tujuan pemberdayaan sebagai

peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan perkembangan pribadi dan koordinaai dengan lingkungan sosial dan fisik yang lebih jauh. Dengan kata lain, pendekatan kualitas sosial memahami pemberdayaan sebagai sarana untuk memungkinkan masyarakat dapat mengontrol lingkungan pribadi, komunitas, dan sosial untuk mendorong perkembangannya.

Di samping itu, pemberdayaan sosial menurut Friedman (1992) dalam Hutomo (2000) adalah sebuah usaha mendorong kelompok lemah untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Dalam hal ini, pemberdayaan sosial menurut Friedman lebih mengarah kepada pemberian kekuatan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber kehidupan.

Berdasarkan penjelasan konsep pemberdayaan sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sosial merupakan serangkaian upaya dalam pemberian daya kepada individu, keluarga, dan/atau komunitas untuk memperoleh akses terhadap informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* (Chambers, 1995 dalam Mardikanto & Soebianto,

2012). Konsep tersebut berkembang lebih luas dari memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) menjadi alternatif terhadap konsep pertumbuhan di masa lalu.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi (Margayaningsih, n.d.). Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen.

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam Nadzir (2015), pemberdayaan ekonomi merupakan serangkaian upaya untuk mendorong ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang dapat dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural tersebut adalah perubahan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern yang dilakukan melalui proses pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan SDM. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi adalah pemberian peluang atau akses lebih besar pada aset produksi, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong wirausaha baru, dan pemerataan spasial.

Sejalan dengan hal tersebut, Hutomo (2000:3) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut.

“Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh akses informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.”

Di samping itu, Ndraha (2003) dalam Fitriyana (2018) menjelaskan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi berkaitan dengan serangkaian usaha untuk meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat berdasarkan pada daya dan upaya yang sifatnya mendorong peningkatan produktifitas masyarakat yang dapat dilakukan melalui pembukaan usaha sebagai sumber pendapatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Surwanti (2014) mengemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui melalui *intrapreneurship* dan *entrepreneurship*. *Intrapreneurship* merupakan proses yang mengarah pada pengembangan inovasi atau kreativitas.

Pada sisi lain, *entrepreneurship* adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang (Zimmerer, 2008 dalam Kaharudin & Djohan, 2022). Dalam hal ini, *intrapreneurship* mengarah pada mempersiapkan tenaga kerja agar dapat diterima di pasar tenaga kerja. Pada sisi lain, *entrepreneurship* adalah pendidikan bagaimana masyarakat mampu untuk mendirikan usaha mandiri (Surwanti, 2014).

Berdasarkan uraian konsep pemberdayaan ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan serangkaian upaya pemberian daya melalui penguatan faktor-faktor produksi, penguatan untuk mendapatkan pendapatan yang memadai, serta penguatan untuk memperoleh akses informasi, pengetahuan dan keterampilan.

3. Konsep Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Pada penelitian ini, konsep pemberdayaan sosial ekonomi diperoleh dari hasil adaptasi dari konsep pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi di atas. Ruang lingkup pemberdayaan sosial ekonomi merujuk pada upaya pemberian daya untuk memperoleh akses informasi, pengetahuan, keterampilan, partisipasi, penguatan faktor-faktor produksi, dan penguatan pemasaran. Konsep pemberdayaan sosial ekonomi tersebut kemudian menjadi acuan peneliti dalam menentukan aspek-aspek penelitian dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pemberian akses informasi

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Davis, 1995). Menurut Narayan (2002), informasi merupakan kekuatan yang dapat memungkinkan pelaksanaan pemberdayaan yang lebih efektif. Akses terhadap informasi dan teknologi berperan penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global, memungkinkan untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, dan menciptakan sumber-sumber pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat rentan (World Bank, 2006).

Menurut Kartono (2004), indikator tingkat akses masyarakat terhadap informasi yaitu tersedianya informasi yang transparan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi. Akses terhadap informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program yang akan dilakukan, nilai-nilai dalam bermasyarakat, ilmu pengetahuan dasar,

hak-hak yang akan diperoleh, masalah yang mungkin akan dihadapi, dan sebagainya (Darwanto, 2004 dalam Maryatun & Lasa, 2009). Pemberian informasi tidak hanya berupa kalimat tertulis, tetapi juga mencakup diskusi pertemuan kelompok dan bentuk lainnya dengan menggunakan media internet atau media teknologi informasi (Narayan, 2002).

Pada penelitian ini, aspek pemberian akses informasi mencakup pemberian informasi tentang program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang dan pemberian kemampuan untuk mengakses informasi. Dengan kata lain, di samping pemberian informasi tentang penjelasan program, penerima manfaat juga diberikan kemampuan untuk dapat mengakses informasi yang diperlukan.

b. Pemberian pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari rasa tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmojo, 2014). Secara teoritis menurut Yuniarsih dan Suwanto (2008), pengetahuan adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang yang lebih spesifik. Pada sisi lain, menurut Taufik (2007) dalam Busro (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan lain sebagainya). Sementara menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009) dalam Fitradana (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah akumulasi hasil dari proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun nonformal yang

dapat memberikan kontribusi pada seseorang didalam memecahkan suatu masalah, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Pada sisi lain, Sutrisno (2014) dalam (Alias & Serang, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan adalah kesadaran dalam bidang kognitif.

Akses terhadap pengetahuan dan informasi merupakan syarat dari proses pemberdayaan (Ife, 2006). Pemberdayaan melalui pemberian pengetahuan menekankan pada pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan, termasuk gagasan-gagasan peningkatan kesadaran untuk membantu masyarakat memahami struktur operasi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya. Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2013:23) mengemukakan bahwa indikator pengetahuan, yaitu kesesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan, pengetahuan karyawan tentang prosedur pelaksanaan tugas, dan pemahaman karyawan tentang prosedur pelaksanaan tugas.

Pada penelitian ini, aspek pemberian pengetahuan merujuk pada proses edukasi yang meliputi pemberian pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan tugas dan pemberian pengetahuan tentang kewirausahaan. Dimana dalam program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang ini, penerima manfaat diarahkan untuk dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan.

c. Pemberian keterampilan

Keahlian seseorang tercermin dengan seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik, seperti mengoperasikan

suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Yuniarsih dan Suwatno (2013:23) menyatakan bahwa keterampilan (*skill*) merupakan kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental. Lebih lanjut tentang keterampilan Dunnett's (2014:105), *skill* adalah sebagai kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.

Karakteristik pelatihan menurut Kamil (2009:20) dalam (Rahmat, 2015) ditentukan oleh lima komponen, yakni a) sasaran pelatihan atau pengembangan yangkedalam perilaku yang dapat diamati dan diukur, b) pelatih (*trainer*) yang mengajarkan pelatihan dengan metode tertentu sehingga peserta akan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap yang diperlukan, c) bahan – bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan, d) metode latihan (termasuk alat bantu) yang sesuai, e) Peserta (*trainee*) sebagai komponen yang cukup penting, sebab keberhasilan suatu program pelatihan tergantung juga pada pesertanya.

Dalam penelitian ini, aspek pemberian keterampilan meliputi pelatihan vokasional atau pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat agar mampu hidup secara mandiri dan produktif yang dilakukan melalui pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif.

d. Kesempatan berpartisipasi

Kesempatan merupakan adanya kondisi lingkungan yang disadari oleh seseorang bahwa dia memiliki peluang untuk berpartisipasi (Slamet, dalam (Nurbaiti & Bambang, 2017). Pada sisi lain, partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan (Rahmawati et.al, 2021). Menurut Ropke (1992) dalam Aromatika (2011), tipe partisipasi anggota terdiri dari partisipasi dalam menggerakkan sumber daya (*resources*), partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam berbagi keuntungan (*benefit*).

Cohen dan Uphoff (1979) dalam Rosyida & Nasdian (2011) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: a) tahap pengambilan keputusan pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat; b) tahap pelaksanaan dalam pembangunan yang diwujudkan melalui partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota; c) tahap evaluasi sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya; d) tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.

Tingkat kesempatan berpartisipasi dalam suatu program ditentukan oleh pihak penyelenggara program, yaitu sejauh mana penyelenggara

memberikan ruang kepada sasaran program untuk berpartisipasi (Suharto, 2005 dalam Nurbaiti & Bambang, 2017).

Dalam penelitian ini, aspek pemberian kesempatan berpartisipasi mencakup pemberian kesempatan berpartisipasi dalam Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang dan pemberian kesempatan berpartisipasi dalam pengembangan diri.

e. Penguatan faktor produksi

Produksi merupakan suatu proses kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa (Assauri, 1993 dalam Fahrurrozi & Pahrudin, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Sukirno dalam Tritania (2022) menyebutkan bahwa produksi merupakan aktivitas manusia yang menghasilkan barang y berkualitas maupun jasa yang dapat dikonsumsi oleh para customer. Di sisi lain, Pracoyo et.al dalam Tritania (2022) menjelaskan produksi sebagai proses input diubah menjadi output berupa penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengemasan ulang sampai pemasaran.

Menurut Masyhuri (2007) dalam Ani (2018), macam-macam faktor produksi dibagi menjadi empat, yaitu lahan (sumber daya alam), tenaga kerja (SDM), modal, dan manajemen kewirausahaan. Faktor produksi lahan (sumber daya alam) dan tenaga kerja (SDM) disebut sebagai faktor produksi primer. Pada sisi lain, modal dan manajemen disebut sebagai faktor produksi sekunder (Pasaribu, 2013). Pada penelitian ini, penguatan faktor produksi meliputi pemberian aset atau lahan, pemberian modal, penguatan SDM, dan penguatan manajemen kewirausahaan.

f. Penguatan pemasaran produk

Menurut Stanton (2007) dalam Astuti (2014), pemasaran merupakan sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memenuhi keinginan serta mencapai pasar sasaran dan tujuan perusahaan. Pemasaran sebagai proses seseorang untuk memperoleh kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan dan menawarkan produk (Kotler, 1997 dalam Lukitaningsih, 2014). Menurut Sukanti (n.d), pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial untuk memperoleh apa yang diperlukan dengan menciptakan dan menawarkan produk.

Proses pemasaran meliputi analisis peluang, memilih pasar sasaran, serta mengembangkan dan mengelola bauran pemasaran (Sukanti, n.d). Pada penelitian ini, aspek penguatan pemasaran produk mencakup penguatan pemasaran produk kewirausahaan dari penerima manfaat.

2.2.2. Konsep Penerima Manfaat

Berdasarkan Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas Tahun 2020, penerima manfaat merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan serangkaian manfaat atau tindakan intervensi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan

sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Kemensos, 2019).

Secara garis besar, di Indonesia terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS, yaitu: (a) anak balita terlantar, (b) anak terlantar, (c) anak berhadapan dengan hukum, (d) anak jalanan, (e) anak dengan disabilitas (ADK), (f) anak yang menjadi korban tindak kekerasan, (g) anak yang memerlukan perlindungan khusus, (h) lanjut usia terlantar, (i) penyandang disabilitas, (j) tuna susila, (k) gelandangan, (l) pengemis, (m) pemulung, (n) kelompok minoritas, (o) bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), (p) orang dengan HIV/AIDS (ODHA), (q) korban penyalahgunaan narkoba, (r) korban *trafficking*, (s) korban tindak kekerasan, (t) pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), (u) korban bencana alam, (v) korban bencana sosial, (w) perempuan rawan sosial ekonomi, (x) fakir miskin, serta (y) keluarga bermasalah sosial psikologi.

Penyelenggaraan program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup dengan semestinya. Penerima manfaat dalam program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang terdiri dari penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, serta kelompok rentan lainnya yang sudah menjadi binaan Balai. Penerima manfaat yang sudah selesai mengikuti asesmen beserta pelatihan dan siap untuk berwirausaha diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya di Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang dengan diberikan bantuan ATENSI lanjutan berdasarkan hasil asesmen.

2.2.3. Konsep Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik

Pada penelitian ini, penerima manfaat program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang difokuskan pada PPKS kategori penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas mengacu pada orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera selama periode waktu yang lama, yang dapat mempersulit mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial mereka berdasarkan kesamaan hak (Widinarsih, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 4 ayat 1, ragam penyandang disabilitas terdiri dari: a) penyandang disabilitas fisik dengan terganggunya fungsi gerak, b) penyandang disabilitas intelektual dengan terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, c) penyandang disabilitas sensorik dengan terganggunya fungsi dari pancaindera, serta d) penyandang disabilitas mental dengan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

Penerima manfaat program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang dengan kategori penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik. Maka dari itu, pada penelitian ini konsep penerima manfaat lebih spesifik pada ragam penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik yang ditinjau dari berbagai pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak, yang diantaranya yaitu amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat

kusta, dan orang kecil. Abdoellah (2008) mendefinisikan penyandang disabilitas fisik sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan ini dapat bersifat permanen atau temporer, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecelakaan, penyakit, atau bawaan lahir. Sejalan dengan pendapat tersebut, Yusoff (2010) mendefinisikan penyandang disabilitas fisik sebagai individu yang memiliki keterbatasan fungsi fisik, termasuk mobilitas, keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas, seperti berjalan, berlari, dan/atau naik tangga.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi kemampuan motorik atau fungsi gerak pada anggota tubuh seseorang dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyandang disabilitas fisik cenderung mengalami kesulitan dalam hal mobilitas pada aktivitas sehari-harinya. Maka dari itu, penyandang disabilitas fisik memerlukan alat bantu berupa kursi roda atau tongkat untuk berjalan.

2. Penyandang Disabilitas Sensorik

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi panca indera, diantaranya yaitu disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Beberapa penyebab disabilitas sensorik menurut Heather Mason et. al (1999) dalam Salsabila et al. (2019), yaitu: (a) faktor genetic herediter yang diturunkan orang

tua, (b) perkawinan sedarah atau incest, (c) proses kelahiran yang mengalami trauma, premature, kekurangan oksigen, dan lainnya, (d) penyakit anak-anak yang akut sehingga berkomplika pada organ, (e) kecelakaan yang melukai organ atau syaraf tubuh, (f) perlakuan kontinyu dengan obat-obatan yang berdampak negatif, (g) infeksi oleh binatang yang dapat merusak organ, serta (h) beberapa kondisi kota dengan suhu yang panas membawa bibit penyakit.

Menurut Winarsih (n.d) dalam Putri (2023), penyandang disabilitas sensorik rungu merupakan seseorang yang mengalami kekurangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena ketidakberfungsian sebagian alat seluruh alat pendengaran, sehingga berdampak pada kehidupannya secara kompleks terutama dalam berkomunikasi. Sedangkan penyandang disabilitas sensorik wicara merupakan gangguan dalam berkomunikasi secara lisan (Awaluddin, 2016 dalam Meirista et al. (2020). Menurut Purwanto (1998) dalam Meirista et.al (2020), tuna wicara diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu keterlambatan bicara (*speech delay*), gagap (*stuttering*), kehilangan kemampuan bahasa (*dysphasia*), dan kelainan suara (*voice disorder*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas sensorik merupakan kondisi terganggunya alat panca indera yang membatasi kemampuan sensorik pada anggota tubuh seseorang dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyandang disabilitas sensorik cenderung mengalami kesulitan dalam hal komunikasi pada aktivitas sehari-harinya. Maka dari itu, penyandang disabilitas sensorik rungu wicara memerlukan alat bantu untuk mendeteksi adanya suara.

2.2.4. Konsep Kewirausahaan Sosial

Wirausaha merupakan seorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejar peluang tersebut (Schumpeter; Bygrave, 1996; Firmansyah & Roosmawarni, 2019). Menurut Machfoedz (2004) dalam Firmansyah & Roosmawarni, 2019), wirausaha adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa dijual, dapat memberikan nilai tambah melalui upaya, waktu, biaya, serta kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.

Pada konteks kewirausahaan sosial, paling tidak akan ditemukan tiga istilah yang saling berkaitan, yaitu *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial), *social entrepreneur* (wirausaha sosial atau orang yang melakukannya), dan *social enterprise* (lembaga/institusi atau perusahaan sosial yang menaungi aktivitas kewirausahaan sosial). Menurut pendapat Cukier (2011) dalam Sofia (2017), kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) adalah sebuah istilah turunan dari *entrepreneurship*. Gabungan dari dua kata, *social* yang artinya kemasyarakatan, dan *entrepreneurship* yang artinya kewirausahaan. Selanjutnya, Hulgard (2010) dalam Tenrinippi (2019) merangkum definisi kewirausahaan sosial dengan lebih komprehensif, yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara

bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.

Berdasarkan beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial adalah suatu terobosan baru sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam mengatasi masalah sosial yang melibatkan penggunaan semua sumber daya secara inovatif untuk mempercepat perubahan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Di samping itu, terdapat 2 (dua) pandangan melihat kewirausahaan sosial, yaitu kewirausahaan sosial sebagai perusahaan non-profit (pandangan tradisional) dan kewirausahaan sosial sebagai perusahaan yang menggunakan pendekatan intersektor baru (pandangan baru). Dart (2004) melihat konsep kewirausahaan sosial sebagai inovasi terbaru dalam bidang keberfungsian usaha sosial yang dibuktikan dengan adanya perubahan dalam kompetensi manajerial dan target pasar ke non-profit aktor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Melihat kewirausahaan sosial sebagai inovator yang berkontribusi secara aktif untuk melakukan perubahan sosial melalui kreativitas dan berorientasi pada inovasi dalam proses berwirausaha (Mair and Martí, 2004).

2.2.5. Relevansi dengan Konsep Pekerjaan Sosial

Menurut Netting (2001), pekerjaan sosial atau pekerja sosial (*social workers*) adalah profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam definisi tersebut sudah tertera jelas bahwa peran pekerja sosial berkaitan dengan pelayanan-pelayanan sosial. Salah satu bentuk pertolongan yang diberikan pekerja sosial yaitu dengan melakukan

pengembangan pelayanan sosial untuk meningkatkan kebermanfaatan suatu program pelayanan sosial.

Pada sisi lain, Friedlander (1961) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai sebuah layanan profesional, yang berlandaskan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan insani, yang membantu individu atau dalam kelompok, untuk memperoleh kepuasan sosial dan pribadi serta kemerdekaan. Pada definisi tersebut, Friedlander menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi landasan bagi pekerja sosial untuk melakukan praktik layanan profesional. Dengan begitu, indikator capaiannya yakni individu maupun kelompok sebagai sasaran penerima layanan dapat memperoleh kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya.

1. Pekerjaan Sosial Makro

Berdasarkan pendapat Zastrow dalam Suharto (2010), bahwa profesi pekerjaan sosial membantu masyarakat pada level mikro, mezzo, dan juga makro. Pada level makro, pekerjaan sosial menyentuh lapisan masyarakat yang lebih besar seperti kelompok masyarakat desa dan sebagainya, sehingga tidak terlalu menekankan pada intervensi individual atau intervensi kelompok kecil.

Salah satu metode pekerjaan sosial makro yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial adalah Pengembangan Masyarakat (PM). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan terlibat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS).

Pada setting makro, Zastrow (1999) mengemukakan bahwa pekerja sosial berperan sebagai *empowerer* yang membantu individu dan kelompok untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuannya. Pada sisi lain, Menurut Johnson (1984) peran pekerja sosial yang relevan dengan ranah kerja pekerja sosial, diantaranya yaitu: (a) fasilitator, yang memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama; (b) advocator, yang terdiri dari advokasi kasus (*case advocacy*) untuk individual dan advokasi kelas (*class advocacy*) untuk sekelompok anggota masyarakat; (c) broker, yang menghubungkan klien dengan sistem sumber; dan (d) mediator, sebagai fungsi kekuatan ketiga untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Schwartz (1961:157-158) dalam Suharto (2006), terdapat 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial yaitu: 1) mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapinya, 2) mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka. 3) memberi kontribusi dari mengenai ide- ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam

menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka 4) membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial. 5) mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk.

2. Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas

Menurut (Huripah, 2014), fungsi utama pekerja sosial dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas adalah membantu penyandang disabilitas meningkatkan kemampuannya secara lebih efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.

Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: (a) mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan penyandang disabilitas yang memerlukan pertolongan dalam menghadapi tugas kehidupannya, (b) memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada penyandang disabilitas yang sedang mengalami krisis, (c) memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengutarakan tentang kesulitan-kesulitan, (d) membantu penyandang disabilitas memilih dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta membantu dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengkonfrontasikan penyandang disabilitas terhadap realitas situasi kehidupan yang dialaminya, (f) memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan serta berusaha mendorong terjadinya perubahan, mengajarkan keterampilan untuk membantu mewujudkan aspirasi penyandang disabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Pekerja sosial berperan untuk menghubungkan penyandang disabilitas dalam berbagai sistem sumber. Fungsi ini dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: (a) mengidentifikasi penyandang disabilitas yang membutuhkan sistem sumber, tetapi karena sesuatu hal tidak mampu memanfaatkannya, memberikan informasi tentang adanya sumber, hak-hak mereka, serta prosedur untuk memanfaatkannya; (b) membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan rujukan guna memperoleh sumber-sumber lain yang tidak tersedia di lembaga atau dimana pekerja sosial bertugas; serta (c) bertindak sebagai advokat dari sebagian penyandang disabilitas yang dihadapkan pada kesulitan memperoleh sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya.

Pekerja sosial juga berperan dalam memberikan fasilitas interaksi, merubah dan menciptakan hubungan baru dengan sistem-sistem sumber. Fungsi ini dapat dicapai tugas pekerja sosial, sebagai berikut: (a) memberikan pelayanan konsultasi bagi sistem sumber serta memberikan saran tentang penggunaan metoda pemberian pelayanan yang bervariasi bagi penyandang disabilitas, mengkaitkan penyandang disabilitas dalam sistem sumber agar mereka masuk dalam sistem perencanaan dan pendekatan yang terkoordinasi bagi keluarga dan individu, bertindak sebagai penengah dalam memecahkan konflik-konflik diantara sistem sumber.

Pekerja sosial berperan untuk mempermudah interaksi, merubah dan menciptakan hubungan diantara penyandang disabilitas dalam lingkungan sistem sumber. Dalam hubungan ini pekerja sosial dapat membantu suatu keluarga yang anggotanya mengalami kedisabilitasn agar merubah cara interaksi, membantu mereka saling memperoleh dukungan emosional. Fungsi ini dapat

dicapai melalui tugas pekerja sosial, sebagai berikut: (a) menyalurkan informasi dari bagian yang satu ke bagian yang lain dari suatu system, (b) mewakili kepentingan suatu bagian dari suatu sistem yang kurang memiliki kekuatan, tidak mampu membuat keputusan, dan tidak mendapatkan kepuasan dari pelaksanaan peranannya dalam sistem tersebut, memberikan atau melatih keterampilan-keterampilan kepada anggota sistem agar mereka mampu melaksanakan peranannya secara memuaskan.

Pekerja sosial juga dapat memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial bagi penyandang disabilitas. Pekerja sosial menghadapi hambatan yang dapat membatasi dan mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan fundamental pada kebijakan atau perundang-undangan sosial bagi penyandang disabilitas menyangkut perubahan pada struktur dasar lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Beberapa peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah memungkinkan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuannya secara lebih efektif dalam pelaksanaan tugas kehidupannya (enabler), menghubungkan penyandang disabilitas dalam berbagai sistem sumber (broker), memberikan fasilitas interaksi dan menciptakan hubungan baru dengan sistem-sistem sumber (fasilitator), serta memberikan sumbangan bagi perubahan dan perkembangan kebijakan yang mengatur tentang penyandang disabilitas (advocator).

